

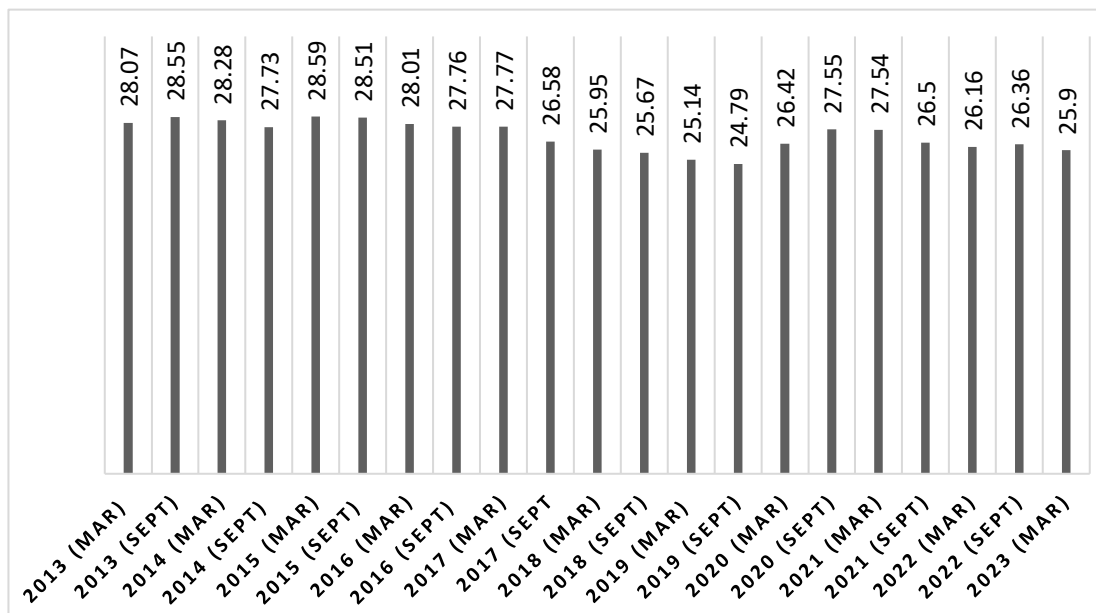
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kondisi nasional menuju ke arah yang lebih baik. Keberhasilan pembangunan negara salah satunya diukur dari berkurangnya angka penduduk miskin. Diungkapkan dalam Prayoga et al., (2021) terdapat beberapa faktor penyebab kemiskinan di antaranya, upah minimum yang tidak memenuhi kebutuhan, standar hidup masyarakat yang rendah, peningkatan jumlah pengangguran setiap tahun, dan kurangnya peluang kerja tambahan. Indonesia menempati peringkat ke-73 dari 100 negara termiskin di dunia menurut *World Population Review 2022*. Data dari *World Bank* menunjukkan bahwa penduduk Indonesia sekitar 60 persen masih hidup di bawah garis kemiskinan (Komisi IX DPR R1, 2022).

Grafik 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Periode 2013-2023 (Juta Jiwa)



Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Berdasarkan grafik 1.1 diketahui bahwa data jumlah penduduk miskin Indonesia sepuluh tahun terakhir dari rentang tahun 2013 sampai 2023 mengalami fluktuasi. Frekuensi tertinggi terjadi pada bulan Maret 2015 dan frekuensi terendah terjadi pada bulan September 2019. Pada maret 2020 jumlah ini naik 1,63 juta jiwa terhadap September 2023. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang pada September 2022 dan menurun 0,26 juta orang pada Maret 2022. Angka kemiskinan ini dapat melonjak selain karena adanya wabah *covid-19*, juga terjadi karena masyarakat masih belum berdaya dalam hal pengetahuan, keterampilan, kapasitas, kesadaran dan pemanfaatan potensi yang ada.

Menanggulangi kemiskinan adalah tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang berisi bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Upaya mempercepat penanganan kemiskinan dapat dilakukan melalui penyusunan program-program dan keputusan terkait tindakan penanggulangan kemiskinan di berbagai instansi pemerintah, yang kemudian dapat diawasi dan dikendalikan proses pembangunannya.

Tabel 1. 1 Angka Penduduk Miskin Kota Semarang 2013-2023

Kota Semarang	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)				
	2019	2020	2021	2022	2023
	71,97	79,58	84,45	79,87	80,53

Sumber : Badan Pusat Statistik 2019-2023

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Semarang selalu meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2021, setelahnya menurun pada tahun 2022 dan melonjak kembali di tahun 2023. Angka penduduk miskin tersebut masih tergolong kategori miskin karena seperti yang dikatakan oleh Bu Ita selaku Walikota Semarang periode 2022, bahwa angka permasalahan kemiskinan dan pengangguran terbuka di Kota Semarang masih tinggi, yaitu 7 persen, angka ini di atas provinsi maupun nasional yang saat ini berada antara 5 sampai 6 persen. Kesenjangan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional yang mungkin belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Faktor-faktor seperti fluktuasi pasar, kebijakan ekonomi, dan ketersediaan lapangan kerja nasional dapat memengaruhi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kota Semarang (Rahayu, 2023). Partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan dan masyarakat sasaran sangat penting dalam membantu menangani masalah kemiskinan, mengingat kompleksitas masalah tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu strategi dalam mengurangi tingkat kemiskinan melalui kebijakan yang mengikat pemerintah dalam memberikan wewenang penuh kepada kepala daerah untuk mengatur dan mengelola wilayahnya. Upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan negara untuk Kota Semarang,

yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang yang berorientasi pada, peningkatan kemampuan serta pengembangan keterampilan pokok dan keterampilan usaha penduduk miskin, meningkatkan kontribusi penduduk miskin pada proses pengambilan keputusan umum, merealisasikan perwujudan keadaan penduduk miskin agar mendapatkan peluang sebesar-besarnya, untuk memenuhi kebutuhan pokok dan penambahan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Salah satu upaya inovatif yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang adalah pendirian kampung tematik. Langkah ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam mengelola potensi lokal dan mengatasi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan perbaikan kualitas permukiman. Sesuai dasar hukum pelaksanaan kampung tematik, yaitu Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan potensi lokal;
- b. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman;
- c. Mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Kota Semarang sampai pada tahun 2023 telah menetapkan dan meresmikan 269 kampung tematik (Gambar 1.1). Berikut merupakan data perkembangan jumlah kampung tematik di Kota Semarang.

Gambar 1. 1 Perkembangan Jumlah Kampung Tematik Kota Semarang Tahun 2016-2023



Sumber : Pemerintah Kota Semarang 2023

Program kampung tematik ini mendapatkan dana sebesar Rp 200.000.000, yang akan digunakan untuk upaya fisik dan non-fisik guna menangani masalah wilayah serta mengembangkan potensi yang ada. Sumber dana tersebut berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), yang dialokasikan setelah disetujui dan diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, berdasarkan proposal pendanaan yang telah diajukan.

Kampung *Home* Industri, Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, merupakan salah satu kampung tematik yang bertemakan *home* industri ramah lingkungan pertama yang ada di Kota Semarang. Lokasinya berada di RW 05 Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Awal dibentuk kampung ini dari lomba rumah sehat Kota Semarang yang mengambil RW 05 sebagai perwakilan dari Kelurahan Karanganyar Gunung, dengan menampilkan inovasi unggulan, yaitu sektor UMKM *home* industrinya dan memenangkan juara tiga. Pada bulan Juli 2016, Kelurahan Karanganyar Gunung kembali mengikuti lomba lingkungan sehat PKK, namun hanya meraih juara harapan tiga tingkat Kota Semarang karena warga

menyadari bahwa lingkungan kampung belum memenuhi aspek penilaian juri, seperti terdapat kolam yang kurang terawat dan penghijauan yang kurang.

Pengalaman mengikuti lomba ini meyakinkan masyarakat untuk mendirikan Kampung *Home* Industri pada September 2016 sebagai sarana pengembangan usaha industri rumahan yang terdapat di RW 05, Kelurahan Karanganyar Gunung, serta perbaikan kualitas lingkungan. Setelah diresmikan, Kampung *Home* Industri Kelurahan Karanganyar Gunung meraih juara dua dalam lomba UMKM kreatif Kota Semarang tahun 2019-2020. Inilah yang menjadi daya tarik bagi peneliti untuk meneliti di Kampung *Home* Industri Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari. Seperti yang diungkapkan oleh Koordinator Kampung *Home* Industri sekaligus ketua Tim Pokja (kelompok kerja) tiga Kelurahan Karanganyar Gunung dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, yaitu :

“Jadi, awal mulanya itu ada lomba *mbak* mewakili kelurahan tingkat kecamatan tahun 2016 itu lombanya lomba rumah sehat. Kebetulan saya adalah Tim Pokja (kelompok kerja) tiganya sehingga saya disuruh untuk mencari tempat untuk dilombakan, ya akhirnya saya mengajukan RW 05 ini karena saya melihat unggulannya itu industrinya *mbak*. Di sini itu banyak yang jualan hasil olahan dan rajut gitu *mbak*. Waktu itu dikunjungi juri juga, mau tau betul-betul ada tempat rajutnya apa *ndak*, dan waktu itu dapat juara tiga *mbak* tingkat kota kategori inovasi kampung sehat ada unggulan UKM nya. Ya Alhamdulillah *mbak* di awal-awal dibentuk sampai diresmikan kampung ini lumayan sering menang lomba, *cuma* ya kendalanya di dalam partisipasi masyarakatnya terutama yang pengurus.” (Wawancara dengan Koordinator Kampung *Home* Industri pada tanggal 17 Mei 2023).

Produk yang dihasilkan oleh Kampung *Home* Industri adalah produk usaha rumahan yang terdiri dari berbagai macam makanan dan kerajinan. Masyarakat di Kampung *Home* Industri dalam pelaksanaannya memiliki kebebasan untuk memilih jenis produk yang ingin mereka jual, tanpa adanya

keharusan untuk memproduksi atau menjual produk tertentu. Anggota tersebut terdiri dari 81 pelaku UMKM bidang pangan, sembako, serta IRT (industri rumah tangga) dan terdapat 15 pelaku UMKM bidang jasa, kraft, dan sandang. Total pelaku UMKM di Kampung *Home* Industri adalah 96 pelaku UMKM (Tabel 3.4), angka ini mengalami peningkatan 54 orang dari yang sebelumnya total pelaku UMKM pada tahun 2022 sebanyak 42 orang.

Sangat disayangkan dari 96 UMKM tersebut baru sekitar lima pelaku usaha yang sudah memperbarui izin usaha NIB (Nomor Induk Berusaha) menjadi NIB-RBA (Nomor Induk Berusaha-*Risk Based Approach*), melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Masyarakat pemilik UMKM enggan memperbaharui izin usahanya dengan yang berbasis resiko, ataupun jenis perizinan lain seperti PIRT, Halal dan lainnya. Alasan utamanya adalah karena kurangnya waktu luang untuk mengurusnya, serta persepsi bahwa prosedur administratifnya rumit dan membingungkan. Koordinator Kampung *Home* Industri memberikan keterangan bahwa:

“Masyarakat masih belum semangat untuk memajukan kampung tematik ini, seperti halnya untuk perizinan usaha yang sudah dipermudah dengan adanya kampung tematik masih ada saja yang tidak mau mendaftarkan produknya dengan alasan administrasinya ribet, tidak ada waktu dan sebagainya”. (Wawancara dengan Koordinator Kampung *Home* Industri pada 17 Mei 2023)

Program pemberdayaan masyarakat di Kampung *Home* Industri yang telah berjalan sejak tahun 2016 mengalami beberapa kendala yang mencakup aspek fisik, sosial, dan ekonomi. Salah satu kendala pada aspek fisik adalah kurangnya pemanfaatan prasarana pemasaran, seperti galeri *home* industri. Meskipun galeri *home* industri dibangun untuk menjadi tempat pemasaran produk UMKM

dan sebagai ruang *display* produk saat ada kunjungan, namun setelah hampir 2 tahun berdiri, masih belum dimanfaatkan dengan baik.

Permasalahan berikutnya terletak pada aspek sosial, fasilitator program didapati saling melempar tanggung jawab atas perannya dalam pelaksanaan program. karena pihak kelurahan melimpahkan *jobdesk* kepada koordinator Kampung *Home* Industri dalam pelaksanaan program secara penuh sehingga sering terjadi *overlapping jobdesk*. Dalam tahap sosialisasi Koordinator Kampung *Home* Industri memerlukan bantuan motor penggerak sebagai agen penyampai informasi namun belum direalisasikan oleh Ketua RW 05 sejak awal pembentukan hingga kini. Berikut adalah hasil wawancara dengan koordinator, bahwa :

“Selain ujung tombak pokja 3, kita memang butuh motor penggerak. katanya setiap RT mau dikasi cuma ya belum terlaksana sampai sekarang. Saya sudah minta dari jaman Ketua RW 2016 sampai sekarang belum diberikan. Saya sering banget *mbak ngerapel* kerjaan, saya jadi pengurus iya kemudian di bidang pemasaran juga iya karena ya sejak awal saya sudah *dipasrahi* oleh kelurahan dan saya aktif di kelurahan maupun kecamatan”. (Wawancara dengan Koordinator Kampung Home Industri pada tanggal 22 Maret 2024).

Para pemangku kepentingan seperti koordinator, RW, kelurahan dan kecamatan tidak ada yang memiliki salinan proposal Kampung *Home* Industri, di mana proposal tersebut merupakan pedoman dalam pelaksanaan program. Kelurahan juga mengilangkan surat yang diberikan oleh Koordinator Kampung *Home* Industri. Hal ini mengindikasikan arsipari yang kurang baik berupa pemeliharaan dan penyimpanan dokumen penting. Tanpa salinan proposal, menjadi sulit untuk melacak dan memverifikasi bagaimana proposal tersebut telah disusun, disetujui, dan dilaksanakan. Kondisi ini dapat mengurangi tingkat

akuntabilitas dalam pelaksanaan program karena sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan atau kegagalan yang mungkin terjadi.

Mengenai keterlibatan masyarakat, sebagian sudah aktif berpartisipasi, tetapi masih ada masyarakat yang rasa memiliki programnya kurang dan cenderung pasif dalam pelaksanaan program atau saat ada kegiatan rembuk warga. Meskipun masyarakat telah disosialisasikan program pemberdayaan ini, masyarakat kurang antusias dan cenderung pasif saat ada rembuk warga, karena merasa jenuh dengan program yang ada. Koordinator Kampung *Home* Industri menuturkan bahwa :

“Memang sekarang itu semangat pelaku UMKM dalam rangka pengembangan kampung tematik sangat menurun. Ini mulai keliatan waktu lomba tahun 2018 yang ekonomi kreatif itu kita dapat juara 2. Kalau ada pertemuan juga kadang pada *ndak* dateng, kalau dateng juga pasif”. (Wawancara dengan Koordinator Kampung *Home* Industri pada tanggal 11 Desember 2023).

Masalah lain yang ditemukan adalah kurangnya integrasi yang baik di antara paguyuban yang ada karena kurangnya rasa kepemilikan program dan dukungan pemangku wilayah yang kurang. Mantan Ketua RW 05 pada suka menunda-nunda pertemuan dan dalam memberikan izin sehingga motor penggerak program tidak maksimal untuk mengembangkan Kampung *Home* Industri.

Permasalahan pada aspek ekonomi, yaitu kurang maksimalnya hasil pendapatan *home* industri karena terkendala pemasaran. Kendala pemasaran ini kuncinya di masyarakat sasaran sendiri karena pemerintah telah memfasilitasi pemasaran selain bazar juga kerjasama dengan dinas yang dijumpai oleh kecamatan. Mayoritas masyarakat cenderung tidak bergerak karena ada di zona

nyaman menggunakan metode pemasaran tradisional dan belum memiliki cita-cita yang ingin lebih melebarkan sayap terhadap produknya.

Terkait modal usaha, modal tersebut dilakukan secara swadaya, bantuan yang ada kemungkinan berupa KUR (Kredit Usaha Rakyat) di mana warga dapat meminjam modal dengan bunga yang rendah. Fasilitas pendanaan yang diberikan oleh pemerintah kota dianggarkan dalam bentuk pembangunan fisik - non fisik dan jumlahnya juga terbatas, yang mana realisasinya di Kampung *Home* Industri digunakan untuk pembangunan infrastruktur kampung (Gambar 1.2). Bappeda mempertegas bahwa tidak ada bantuan modal dalam pelaksanaan kampung tematik, sebagai alternatif pelaksanaan program pemberdayaan melalui Kampung *Home* Industri ini dapat digabung dengan anggaran lain yang ada di perangkat daerah setempat. Bappeda Kota Semarang mengemukakan bahwa :

“Memang dana sebesar 200 juta itu untuk kampung tematik yang bersumber dari APBD. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung kegiatan fisik dan non-fisik, namun tidak termasuk modal usaha. Kemungkinan adanya bantuan modal usaha disediakan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR)”. (Wawancara Bappeda Kota Semarang).

Gambar 1. 2 Gapura dan Pavingisasi Kampung *Home* Industri RW 05



Sumber : Website Kecamatan Candisari 2023

Pemberdayaan masyarakat ditinjau dan dilakukan di dalam administrasi dengan pendekatan yang bertitik tolak dari teori pokok manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (Kartasasmita, 2000). Dalam administrasi publik pada perencanaan melibatkan penyusunan kebijakan dan program untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu dari Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik dengan tujuan yang spesifik sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen publik dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien. Pelaksanaan perencanaan di Kampung *Home* Industri pada awalnya dengan penentuan kriteria wilayah pemberdayaan, seleksi dan penetapan wilayah dengan mengidentifikasi potensi dan masalah yang ada sebagai langkah awal untuk membuat wadah mewujudkan program kampung tematik berbasis pemberdayaan masyarakat.

Administrasi publik terlibat dalam mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan, mencakup proses pelaksanaan program pemberdayaan seperti sosialisasi kepada masyarakat, alokasi pendanaan, dan pengorganisasian kegiatan. Pengawasan adalah bagian penting dari proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan pengumpulan data identifikasi masalah yang mungkin timbul. Pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik, proses perencanaan dilakukan melalui pemetaan potensi dan permasalahan, penentuan tema, penentuan dan penyusunan proposal

kampung tematik dan verifikasi terhadap wilayah yang akan diusulkan menjadi kampung tematik. Tim delivery (dalam Mardikanto & Soebianto, 2017:125) secara sistematis merumuskan strategi untuk memilih wilayah yang tepat untuk program pemberdayaan melalui tahap seleksi wilayah. Analoginya dalam manajemen ini serupa dengan proses perumusan strategi untuk mencapai tujuan tertentu, di mana langkah-langkah spesifik diidentifikasi untuk mencapai hasil yang diinginkan (Kartasmita, 2000:20).

Pelaksanaan kampung tematik dapat dilakukan melalui pengembangan dari kampung tematik yang sudah terbentuk pada tahun 2016-2018. Dalam konteks manajemen tahap ini menggambarkan pelaksanaan strategi yang telah direncanakan dengan seksama di mana upaya nyata dilakukan untuk menjalankan rencana yang telah disusun. Tahap sosialisasi merupakan tahap di mana program pemberdayaan diperkenalkan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Pengawasan selalu ditempatkan paling belakang dalam proses manajemen karena merupakan hal yang penting. Pengawasan juga akan menghasilkan umpan balik sebagai bahan masukan bagi perencanaan pada tahap berikutnya dan bagi kegiatan pelaksanaan yang lebih baik. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengawasan dan umpan balik ini sangat besar peranannya, karena sebagai konsep ia relatif baru dan masih belum dipahami secara luas, bahkan mudah untuk diselewengkan. Dapat saja yang terjadi malah sebaliknya, birokrasi bukan memberdayakan, tetapi memperdayakan masyarakat (Kartasmita, 2000:26).

Berangkat dari hal tersebut, menjadikan peneliti tertarik untuk mengembangkan wawasan dari konteks tersebut dalam administrasi publik dengan pendekatan yang bertitik tolak dari teori pokok manajemen dengan fokus permasalahan melalui rumusan masalah bagaimana upaya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan pemberdayaan di Kampung *Home* Industri, Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kurangnya pemanfaatan prasarana pemasaran berupa galeri *home* industri oleh masyarakat Kampung *Home* Industri.
2. Fasilitator saling melempar tanggung jawab dalam pelaksanaan tahapan pemberdayaan masyarakat di Kampung *Home* Industri.
3. Arsipari berupa pemeliharaan serta penyimpanan dokumen penting yang dilakukan oleh fasilitator kurang baik.
4. Partisipasi aktif dan rasa kepemilikan program oleh masyarakat Kampung *Home* Industri masih kurang.
5. Dukungan fasilitator dalam pelaksanaan program kampung tematik kurang merangkul serta mengajak masyarakat untuk bergerak.
6. Paguyuban Kampung *Home* Industri belum terintegrasi dengan baik.
7. Kurang maksimalnya hasil pendapatan *home* industri karena terkendala pemasaran.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, beberapa permasalahan telah teridentifikasi, di antaranya :

1. Bagaimana upaya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kampung *Home* Industri, Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi pada program Kampung *Home* Industri, Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bagaimana upaya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Kampung *Home* Industri, Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta perbaikan kualitas lingkungan permukiman.
2. Menganalisis faktor yang menghambat pemberdayaan masyarakat pada program kampung *Home* Industri, Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari, untuk mencapai tujuan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang mendukung pengembangan pengetahuan dan pertukaran ide, untuk mendukung upaya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam menyejahterakan masyarakat serta meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di Kota Semarang melalui program kampung tematik sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti berharap dapat berkontribusi dalam menyediakan informasi baru tentang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik dan mendorong peneliti untuk memperluas pengetahuan dengan menemukan informasi terbaru dari berbagai sumber, serta meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan riset.

b. Bagi Perguruan Tinggi Negeri

Peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat menjadi materi rujukan dan pengetahuan tentang pelaksanaan tahapan program pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai perbaikan kualitas lingkungan permukiman.

c. Bagi Pemerintah

Peneliti berharap pemerintah daerah dapat melaksanakan evaluasi lebih lanjut tentang ketepatan pelaksanaan program kampung tematik di Semarang agar mencapai hasil dan keluaran seperti yang diharapkan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik dan tidak terjadi disfungsi oleh birokrat.

d. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap agar masyarakat dapat menyampaikan pengetahuan mengenai inovasi program pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik guna berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas hidup untuk mengentaskan kemiskinan dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman.

1.6 Kajian Pustaka

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Jurnal	Artikel dan Penulis	Tujuan	Hasil Temuan Penelitian
1.	<i>Journal of Public Policy and Management Review</i>	Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Tematik <i>Home Industry</i> di Kelurahan Karanganyar Gunung,	Penelitian ini melakukan analisis terhadap upaya pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Tematik <i>Home Industry</i> dan mengidentifikasi faktor-faktor yang	Dalam penelitian ini, ditemukan fenomena bahwa masyarakat kurang memahami panduan terkait Pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik <i>Home industry</i> terhambat oleh keberadaan paguyuban yang belum terstruktur dan kokoh, yang

No	Jurnal	Artikel dan Penulis	Tujuan	Hasil Temuan Penelitian
		Kecamatan Candisari, Kota Semarang Penulis: (Ha et al., 2022)	dapat menghambat proses tersebut.	juga menyebabkan kurangnya partisipasi dan diskusi lebih lanjut dalam usaha pengembangan kampung <i>home industry</i> . Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kampung tematik <i>home industry</i> juga mengungkapkan beberapa kendala, termasuk masalah pemasaran produk, kurangnya bantuan modal usaha, dan kebutuhan akan pendampingan. Meskipun pemerintah Kota Semarang telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan mereka, upaya tersebut masih perlu diselaraskan dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
2	Jurnal EKOSAINS	Tahapan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Penulis : (Rahmawati et al., 2016)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan tahapan pemberdayaan dalam pengelolaan lingkungan menggunakan PNPM Mandiri Perdesaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam sebagai	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Cangkring telah berhasil mencapai tiga dari empat tahapan dalam teori pemberdayaan Tim Delivery. Ini mencakup tahapan seleksi lokasi atau wilayah, sosialisasi pemberdayaan masyarakat, dan proses pemberdayaan masyarakat. Namun, desa ini masih belum sepenuhnya mencapai Tahap 4, yaitu Tahap Pemandirian Masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masih diperlukannya faktor eksternal seperti Fasilitator Pendamping.

No	Jurnal	Artikel dan Penulis	Tujuan	Hasil Temuan Penelitian
			teknik pengumpulan data.	
3	<i>Journal of Politic and Government Studies</i>	<p>Analisis Implementasi Program Kampung Tematik Dalam Menanggulangi Kemiskinan Kota Semarang (Studi Kasus Kampung <i>Home Industry</i>, Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari</p> <p>Penulis: (Hutoto, 2018)</p>	Mendeskrripsikan cara program Kampung <i>Home Industry</i> di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, mengatasi masalah kemiskinan, dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam mencapai tujuan pelaksanaan program.	Penelitian ini menunjukkan bahwa kunci keberhasilan dalam menciptakan kesejahteraan di Kampung <i>Home Industri</i> adalah peran aktif dari masyarakat dan pemerintah. Kurangnya intensitas komunikasi dari pemerintah menyebabkan masyarakat di Kampung <i>Home Industri</i> merasa kurang didukung secara aktif oleh pemerintah. Meskipun pemerintah telah meluncurkan program kampung tematik, namun pengawasan dan pendampingan masih kurang mendapat perhatian yang memadai. Meskipun kondisi kesejahteraan di Kampung <i>Home Industri</i> mengalami peningkatan, peningkatan tersebut hanya dirasakan oleh masyarakat yang terlibat dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
4	<i>Journal of Politic and Government Studies</i>	<p>Pemberdayaan Masyarakat melalui Kampung Tematik di Kota Semarang (Studi Kasus Kampung Batik)</p> <p>Penulis: (Sarwono et al., 2023)</p>	Tujuan penelitian ini adalah untuk secara teoritis dan empiris mengkaji cara pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui konsep Kampung Tematik di Kampung Batik Kota Semarang, serta hasil yang diperoleh dari proses	Hasil penelitian ini yaitu berupa analisis keadaan melalui tahapan pemberdayaan masyarakat. Ditemukan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat telah dimulai sebelum pendirian kampung tematik. Kegiatan yang telah dilakukan meliputi perbaikan lingkungan, pelatihan membatik, dan penciptaan ikon kampung batik. Selanjutnya, pada tahap

No	Jurnal	Artikel dan Penulis	Tujuan	Hasil Temuan Penelitian
			pemberdayaan tersebut.	transformasi kemampuan, terlihat bahwa masyarakat sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan membuat, dan masih terus menghasilkan serta mengembangkan batik. Selama tahap peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan, masyarakat telah mampu menciptakan inovasi dan menjadi mandiri, dengan tingkat partisipasi yang baik dan kemampuan bersaing dengan pesaing. Dampak dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Tematik di Kampung Batik termasuk memunculkan kembali potensi lokal, meningkatkan keterampilan masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta kemandirian masyarakat.
5	<i>Journal of Politic and Government Studies</i>	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Tematik (Studi Kasus Kampung Tahu Tempe Gumregah di Kelurahan Lamper Tengah, Kota Semarang) Penulis:	Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui konsep kampung tematik serta mengeksplorasi peran modal sosial dalam proses tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi	Studi menunjukkan bahwa pelaksanaan program kampung tematik di Kelurahan Lamper Tengah belum optimal. Bappeda, sebagai perwakilan pemerintah, terlibat dalam perencanaan dan pemantauan program, sementara pelaksanaannya dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Semarang. Terdapat beberapa indikator keberhasilan dalam pemberdayaan, termasuk

No	Jurnal	Artikel dan Penulis	Tujuan	Hasil Temuan Penelitian
		(Kinanti, 2019)	penyempurnaan kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia, terutama di Kota Semarang.	modal sosial di Kampung Tahu Tempe Grumegah, yang mencakup hubungan internal masyarakat. Namun, kelompok pengrajin tahu tempe kurang berhasil menjalin hubungan dengan kelompok lain dan tidak memanfaatkan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah.
6	<i>Journal of Economics, Finance and Management Studies</i>	<p><i>Community Economic Empowerment through Tourism Villages in Sesaot Village, Lombok, Indonesia</i></p> <p>Penulis: (Prayitno Basuki, 2022)</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Sesaot, Narmada, Kabupaten Lombok Barat.</p> <p>Mengevaluasi efek dari program desa wisata yang telah diimplementasikan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Sesaot, serta menganalisis perkembangan sektor pariwisata di Desa Wisata Sesaot.</p>	<p>Ditemukan bahwa Desa Sesaot memiliki potensi wisata yang cukup besar namun dalam prosesnya masih belum optimal. Pengelolaan pariwisata saat ini hanya terfokus pada pengelolaan pusat rekreasi masyarakat sedangkan pengelolaan tempat wisata lainnya belum optimal; Pelibatan masyarakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi berupa penyediaan dan fasilitas pendukung yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan antara lain <i>homestay</i>, makanan dan minuman, jasa wisata, atraksi wisata, fasilitas wisata dan penggunaan tenaga kerja dari masyarakat setempat. Kegiatan Desa Wisata Sesaot berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Berdasarkan hasil matrik analisis SWOT diperoleh empat strategi antara lain: strategi SO (Strengths-Opportunities).</p>

No	Jurnal	Artikel dan Penulis	Tujuan	Hasil Temuan Penelitian
7	<i>European Union Digital Library</i>	<p><i>Community Development Model through Development of Thematic Village as a Local Economic Empowerment Efforts in Semarang City</i></p> <p>Penulis: (Fitriyah & Herawati, 2020)</p>	<p>Untuk memahami Model Pengembangan Masyarakat melalui implementasi program Kampung Tematik di Kota Semarang dan untuk mengevaluasi kemajuan daerah sebagai dampak dari pelaksanaan program tersebut.</p>	<p>Hasil penelitian menegaskan bahwa kesuksesan Kampung Tematik di Kota Semarang sangat bergantung pada kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Masyarakat mengharapkan lebih dari sekedar pembangunan infrastruktur; mereka juga menginginkan pelatihan serta jaringan pemasaran bagi produk-produk dari Kampung Tematik agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya secara independen.</p>
8	<i>Journal of Public Policy and Management Review</i>	<p>Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Di Desa Kaligono Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo</p> <p>Penulis: (Mubarok et al., 2022)</p>	<p>Menyajikan deskripsi dan analisis tentang proses pemberdayaan masyarakat melalui inisiatif pengembangan desa wisata di Desa Kaligono, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemberdayaan masyarakat dalam konteks pengembangan desa wisata tersebut.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata melalui 4 tahapan, yaitu tahap pemilihan lokasi/daerah, tahap sosialisasi, program tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tahap pemilihan lokasi/daerah pemberdayaan masyarakat dan tahap sosialisasi di sana tidak ada kendala, namun terdapat kendala pada tahap pelaksanaan program dan tahap evaluasi sehingga pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Kaligono belum optimal yang terlihat dari kurangnya perawatan wisatawan fasilitas objek dan kondisi lingkungan objek</p>

No	Jurnal	Artikel dan Penulis	Tujuan	Hasil Temuan Penelitian
				<p>wisata yang kurang bersih karena terbatas dana untuk melakukan pemeliharaan objek wisata, tingkat partisipasi masyarakat yang anggota pengurus POKDARWIS dan BPDW mengalami penurunan baik jumlah maupun kegiatan, promosi yang dilakukan belum maksimal, kegiatan masyarakat untuk kewirausahaan masih rendah, dan tidak ada tindak lanjut dari hasil evaluasi dan belum adanya inovasi yang dilakukan untuk mendorong berkembangnya Desa Wisata Kaligono.</p>
9	<p><i>International Journal of Education and Social Science Research</i></p>	<p><i>The Analysis of The Development of Thematic Village Community "Kampung Mangoet" in Bandarharjo, North Semarang</i></p> <p>Penulis: (Karsidi et al., 2020)</p>	<p>Bertujuan untuk menilai proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Mangoet, Kelurahan Bandarharjo, khususnya dalam pengembangan kapasitas masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji implementasi peningkatan kapasitas masyarakat di Bandarharjo.</p>	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa upaya meningkatkan kapasitas masyarakat di Bandarharjo telah dilakukan sesuai dengan prinsip pemberdayaan, menghasilkan peningkatan kesadaran dan pemahaman mereka terhadap peran aktif dalam pembangunan komunitas. Masyarakat Bandarharjo telah memahami prinsip-prinsip pemberdayaan dan mengaplikasikannya untuk kepentingan bersama. Dalam mencapai tahap pembiasaan, diperlukan upaya pembelajaran lebih lanjut agar mereka benar-benar siap mengambil tanggung jawab penuh dalam mengelola pembangunan komunitas. Selain itu, masyarakat juga bersedia melanjutkan</p>

No	Jurnal	Artikel dan Penulis	Tujuan	Hasil Temuan Penelitian
				program pemberdayaan yang telah berjalan.
10	<i>Ilomata International Journal of Social Science</i>	<p><i>Community Empowerment through the Development of the Cisaat Tourism Village, Subang Regency</i></p> <p>Penulis: (Achmad et al., 2023)</p>	<p>Penelitian ini dilakukan untuk merinci bagaimana pertumbuhan desa wisata Cisaat di Kabupaten Subang, Jawa Barat, memfasilitasi model pemberdayaan masyarakat lokal. Penelitian</p>	<p>Dari hasil penelitian program pemberdayaan masyarakat di Desa Cisaat Kabupaten Subang secara umum sudah berjalan dengan baik ditandai dengan terpenuhinya tiga aspek, yaitu jangkauan akses pemberdayaan, tingkat partisipasi masyarakat dan pengawasan desa wisata. Pemberdayaan ini terbukti memberikan manfaat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan, meningkatkan pembangunan desa dan meningkatkan sumber daya manusia masyarakat setempat. Terdapat kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat antara lain kondisi geografis Desa Cisaat yang rawan bencana, kapasitas sumber daya manusia yang tidak merata serta kurangnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar.</p>
11	<i>TRJ Tourism Research Journal</i>	<p><i>The Development of Thematic Tourist Village of Mulyaharja Bogor Based on Community Empowerment Approach</i></p> <p>Penulis: (Parantika et al., 2020)</p>	<p>Penelitian bertujuan untuk mengetahui metode penyelesaian permasalahan di desa wisata tematik Mulyaharja dan merancang pengembangan model desa wisata tematik berbasis pendekatan</p>	<p><i>Outcome</i> yang dihasilkan berupa metode pemecahan masalah berupa bagan langkah penyelesaian yang terdiri dari penjelasan masalah, laporan penyelesaian dan progress masing-masing aspek, kelembagaan, visi, kegiatan, fasilitas, aspek aksesibilitas dan kewirausahaan. Lebih-lebih lagi, Model yang dirancang untuk</p>

No	Jurnal	Artikel dan Penulis	Tujuan	Hasil Temuan Penelitian
			pemberdayaan masyarakat.	<p>pengembangan desa wisata tematik berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan suatu lingkaran dengan rangkaian langkah sebelas langkah yang saling berhubungan dan berkesinambungan. Rangkaian langkah-langkahnya adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memilih calon desa mitra; 2) menentukan kategori desa wisata; 3) melaksanakan MoU; 4) menentukan sasaran program; 5) mengidentifikasi potensi desa wisata; 6) mengelola program pemberdayaan; 7) pelaksanaan program pendampingan; 8) mengarahkan sumber daya perguruan tinggi; 9) mempromosikan hasil program; 10) mengevaluasi program dan 11) memetakan pemangku kepentingan berdasarkan keterlibatan proaktif mereka.
12	<i>The Innovation of Social Studies Journal</i>	<i>Community Economic Empowerment Through The Existence of Thematic Village</i> Penulis :	Mengenali program desa tematik yang diharapkan dapat mendorong sektor terkait untuk melakukan evaluasi ulang terhadap perannya yang strategis. Langkah ini diarahkan pada	Ditemukan bahwa upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah diperkuat dan ditingkatkan untuk mengurangi kemiskinan melalui sejumlah kegiatan, seperti meningkatkan kreativitas dan inovasi yang didasarkan pada potensi dan

No	Jurnal	Artikel dan Penulis	Tujuan	Hasil Temuan Penelitian
		(Subiyakto et al., 2022)	pendekatan pada masyarakat yang mempertimbangkan kemampuan dan potensi sumber daya manusia serta dukungan lokal dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.	kebutuhan masyarakat. Berbagai program yang diluncurkan menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam menangani permasalahan ini, terutama dalam aspek ekonomi. Salah satu contohnya adalah program kampung tematik, yang merupakan inovasi untuk mengatasi kemiskinan. Tujuan dari program ini adalah untuk mengatasi kemiskinan, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di masyarakat.
13	<i>Solidarity: Journal of Education, Society and Culture</i>	Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan melalui Program Kampung Tematik (Studi Kasus di Kampung Batik Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang) Penulis: (Syarifa & Wijaya, 2019)	Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberdayaan yang dilaksanakan melalui program Kampung Tematik, sebuah langkah pembangunan yang digagas oleh Pemerintah Kota Semarang. Program ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di kalangan warga perkotaan dengan menerapkan strategi pemberdayaan	Hasil yang ditemukan penelitian ini menunjukkan beberapa hal, yaitu: 1) Kesuksesan upaya pemberdayaan dapat dinilai dari tingkat keterlibatan masyarakat dalam tahapan perencanaan, implementasi, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan tersebut. 2) Pasca-berdirinya Kampung Tematik, masyarakat menunjukkan tingkat kemandirian yang lebih tinggi dan terjadi peningkatan kesejahteraan. 3) Meskipun Program Kampung Tematik telah dilaksanakan di Kampung Batik, namun

No	Jurnal	Artikel dan Penulis	Tujuan	Hasil Temuan Penelitian
			komunitas dan mengembangkan sektor pariwisata di kampung-kampung pada wilayah perkotaan.	pelaksanaannya belum optimal karena terdapat perkembangan yang tidak merata di beberapa RT. 4) Kendala dalam pelaksanaan Program Kampung Tematik meliputi kurangnya aktor yang menggerakkan kegiatan pemberdayaan serta rendahnya motivasi masyarakat untuk mengembangkan wilayah mereka secara mandiri di beberapa bagian Kampung Batik.
14	<i>International Journal Of Community Service</i>	<i>Community Economic Empowerment with The Tabulampot Method In Medan Sinembah Village, Deli Serdang, North Sumatra</i> Penulis : (Hutasuhut et al., 2022)	Memberikan arahan dan sosialisasi kepada masyarakat melalui ibu-ibu PKK mengenai budidaya sayuran dengan metode Tabulampot (Menanam Buah Dalam Pot) agar mereka lebih termotivasi dan proaktif untuk memecahkan masalah ekonomi yang mereka hadapi. Manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah masyarakat dapat memanfaatkan lahan di sekitar pekarangan gudang	Ditemukan bahwa di daerah pedesaan seperti di Desa Medan Sinembah masih terdapat lahan pertanian yang tidak digunakan secara produktif, selain itu permasalahan yang menjadi tantangan bagi masyarakat Desa Medan Sinembah untuk dapat memanfaatkan lahan terdekat antara lain: 1) Keterbatasan pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian seperti budidaya sayuran dengan metode tabulampot, 2) Kurangnya pemahaman masyarakat dan keterampilan dalam mengelola sumber daya lokal yang ada, 3) Keterbatasan sarana dan prasarana untuk penarikan program pemberdayaan yang telah dilakukan, dan

No	Jurnal	Artikel dan Penulis	Tujuan	Hasil Temuan Penelitian
			<p>untuk hasil yang lebih produktif sekaligus dapat menjadikannya sebagai pengalaman berharga dalam berwirausaha. Setidaknya budidaya sayuran dengan metode tabulampot, sekelompok keluarga dapat menghemat biaya rumah tangga tidak lagi membeli sayuran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.</p>	<p>4) Kurangnya motivasi untuk membuka usaha baru karena ketidakjelasan konsep pemberdayaan.</p> <p>Strategi yang dilakukan sebagai solusi permasalahan tersebut, yaitu melakukan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang meliputi kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi masyarakat yang dilakukan secara mandiri dalam mengelola segala sumber daya yang dapat dikuasai dan ditampilkan kepada mereka.</p>
15	<i>International Journal of Scientific and Technology Research</i>	<p><i>Community Economic Empowerment The Bajo Tribe Is Based On Local Potential (A Case Study in Bajoe Village, East Tanete Riattang Sub-District Bone)</i></p> <p>Penulis : (Hukmiah, 2020)</p>	<p>Untuk menggali potensi sebagai kemanfaatan bagi Suku Bajo diperlukan strategi pemberdayaan antara lain: Menjadikan Desa Bajo sebagai desa wisata, dengan budaya tersendiri yang dimiliki oleh Suku Bajo, menjadikan budaya sebagai sesuatu yang unik dan memiliki nilai jual. Apalagi jika dipadukan dengan wisata alam di Bajoe, seperti memanfaatkan</p>	<p>Potensi lokal Suku Bajo dan masyarakat Bajoe, baik potensi alam seperti laut, pesisir dan pelabuhan, maupun potensi budaya seperti maggenrang (seni gendang), pengibaran bendera ula-ula, mammenca (kesenian bela diri) dan tradisi perkawinan Suku Bajo merupakan aset yang perlu dilestarikan dan diberdayakan guna meningkatkan strata ekonomi masyarakat Bajo. Untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Bajo di Bajoe sesuai dengan potensi lokal yang ada maka strategi pemberdayaan ekonomi yang peneliti tawarkan adalah;</p>

No	Jurnal	Artikel dan Penulis	Tujuan	Hasil Temuan Penelitian
			keindahan laut, pantai, hutan bakau dan Pulau Tangkulara.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menjadikan Bajoe sebagai desa wisata dengan mensinergikan potensi alam dan potensi budaya masyarakat Bajo yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke suku Bajo; 2) Mengolah makanan dari hasil laut dengan pertimbangan, mayoritas masyarakat bajo berprofesi sebagai nelayan, luasnya teluk bajo dan para istri nelayan yang sudah memiliki keahlian dasar dalam mengolah hasil laut seperti penjemuran teripang, ikan dan udang. Walaupun pengolahan ini masih membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai serta kreatifitas pengolahan.

Berdasarkan beberapa contoh hasil penelitian terdahulu dapat dilakukan analisa mengenai manfaat dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan hasil penelitian terdahulu, yaitu penelitian terdahulu memberikan manfaat pada pada penelitian ini sebagai referensi mengenai pemberdayaan masyarakat, tahap-tahap pemberdayaan masyarakat serta pengembangan kampung tematik yang merupakan dasar atau pedoman yang ditemukan dari penelitian sebelumnya dan digunakan sebagai data sekunder.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki fokus pada bagaimana upaya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman melalui program Kampung *Home* Industri. Penelitian ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam program pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana upaya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kampung *Home* Industri, Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari Kota Semarang.

Berdasarkan beberapa contoh penelitian terdahulu pada tabel 1.2, yang peneliti ambil sebagai rujukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Raura Farrah et al. (2022) yang berjudul Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Tematik *Home Industry* di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, jurnal ini menjadi acuan peneliti untuk membandingkan keadaan lokus tahun sebelumnya dan tahun setelahnya, selain itu penelitian ini memiliki persamaan melihat tahapan pemberdayaan masyarakat dan faktor penghambatnya. Perbedaan dengan yang peneliti teliti, yaitu terkait kebaruan data, dan meluruskan beberapa asumsi dalam jurnal ini menggunakan fakta yang ditemukan dari data yang terkini.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al. (2016) yang berjudul Tahapan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, memberikan wawasan

yang berharga tentang implementasi tahapan pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM Mandiri Perdesaan dalam pengelolaan lingkungan. Temuan tentang keberhasilan dalam tiga dari empat tahapan pemberdayaan, serta kebutuhan akan faktor eksternal untuk mencapai tahapanemandirian masyarakat, dapat memberikan inspirasi dan pembelajaran bagi peneliti terhadap program pemberdayaan di Kampung *Home* Industri.

Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Hutoto (2018) yang berjudul Analisis Implementasi Program Kampung Tematik Dalam Menanggulangi Kemiskinan Kota Semarang (Studi Kasus Kampung *Home Industry*, Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari. Penelitian ini memiliki manfaat bagi penulisan penelitian yang dilakukan peneliti dalam mengetahui hambatan yang ada dalam implementasi program pemberdayaan di Kampung Tematik *Home* Industri Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari tahun 2018. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian ini yaitu peneliti mengkaji mengenai bagaimana upaya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta perbaikan kualitas lingkungan permukiman.

Penelitian selanjutnya dengan judul Pemberdayaan Masyarakat melalui Kampung Tematik di Kota Semarang (Studi Kasus Kampung Batik) oleh Sarwono et al., (2023) membantu peneliti dalam menjelaskan bentuk pemberdayaan masyarakat dan fenomena *best practice* dalam kampung tematik di Kota Semarang melalui tahapan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menjadi pembanding dan referensi peneliti pada lokus yang diteliti yaitu

Kampung *Home* Industri dimana keadaannya belum termasuk dalam kategori ideal.

Lain halnya penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah & Herawati, (2020) yang berjudul *Community Development Model through Development of Thematic Village as a Local Economic Empowerment Efforts in Semarang City*. Penelitian ini bermanfaat untuk peneliti terhadap partisipasi masyarakat beserta alasan pentingnya dukungan antar pemangku kepentingan untuk kemajuan program. Penelitian Fitriyah & Herawati melihat bagaimana Program Bina Lingkungan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang memberikan dampak pada program Kampung Tematik di Kota Semarang melalui *Model Community Development*. Partisipasi masyarakat dalam tahap-tahap pemberdayaan masyarakat dimaksudkan agar masyarakat dapat berdaya dan mandiri secara berkelanjutan.

Penelitian dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan melalui Program Kampung Tematik (Studi Kasus di Kampung Batik Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang) yang dilakukan oleh Syarifa & Wijaya, (2019) memiliki manfaat untuk peneliti dalam membantu mendeskripsikan mengenai partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan melalui program kampung tematik untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat perkotaan. Penelitian ini memiliki kesamaan membahas analisis program pemberdayaan masyarakat namun penelitian ini tidak membahas tentang faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat.

1.6.2 Administrasi Publik

1.6.2.1 Pengertian Administrasi Publik

Sejumlah pakar memberikan penafsiran mengenai administrasi publik (dalam Keban, 2014) di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Chandler & Plano (dalam Keban, 2014:3) administrasi publik merupakan proses di mana sumber daya dan aktor sektor publik diatur dan diselaraskan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan mengelola keputusan yang terkait dengan kebijakan publik.
2. Menurut Nicholas Henry (dalam Keban, 2014:6) administrasi publik adalah gabungan kompleks antara konsep teoritis dan penerapannya, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai fungsi pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang menjadi fokus pelayanan, serta mendorong kebijakan publik agar lebih terhadap kebutuhan sosial.
3. Menurut Dimock, Dimock & Fox (dalam Keban, 2014:5) administrasi publik adalah penciptaan barang dan jasa yang direncanakan dengan tujuan memenuhi kebutuhan konsumen masyarakat. Dalam pengertian ini, administrasi publik dianggap sebagai aktivitas ekonomi atau mirip dengan bisnis, namun dengan fokus khusus pada pembuatan barang dan penyediaan layanan publik.

Dari definisi administrasi publik yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah kolaborasi antara sekelompok orang atau entitas dalam menjalankan fungsi-fungsi

pemerintahan dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal dan efisien.

1.6.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Dikatakan oleh G. Shabbir Cheema (2007) (dalam Keban, 2014:37) mengenai empat fase administrasi publik yang juga menggambarkan perkembangan paradigma administrasi. Empat paradigma tersebut adalah:

1. *Traditional public administration*, yang mengutamakan hierarki, kontinuitas, netralitas, standarisasi, legalitas-rasionalitas, otoritas, dan profesionalisme.
2. *Public management*, yang fokusnya adalah menerapkan prinsip-prinsip manajemen seperti penggunaan sumber daya yang efisien, efektivitas, pelayanan pelanggan yang baik, orientasi pada pasar, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Paradigma ini juga mendorong peran sektor swasta yang lebih besar, mengurangi peran sektor publik, dan mempersempit cakupan dari administrasi publik tradisional.
3. *New public management*, yang mengedepankan prinsip-prinsip fleksibilitas, pemberdayaan, inovasi, dan fokus pada hasil, serta praktik *outsourcing*, dan kontrak. Paradigma ini juga mempromosikan etika dalam profesi dan manajemen, serta penggunaan anggaran berbasis kinerja.
4. *Governance* adalah suatu sistem nilai-nilai kebijakan dan struktur kelembagaan yang mengelola urusan ekonomi, sosial, dan politik melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.

Paradigma ini menekankan pada mekanisme dan proses di mana warga dan kelompok masyarakat dapat menyuarakan kepentingan mereka, remediasi perbedaan, dan memenuhi hak serta kewajiban mereka. Pemerintah diharapkan untuk membentuk kondisi politik dan hukum yang mendukung, sementara sektor swasta bertanggung jawab atas penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat sipil, di sisi lain, memfasilitasi interaksi sosial dan politik yang sehat. Intinya, paradigma ini menekankan pada peningkatan interaksi antara ketiga aktor tersebut untuk mempromosikan pembangunan yang berpusat pada kepentingan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat melalui Kampung *Home* Industri dapat tergolong dalam paradigma *governance* karena melibatkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam mengelola urusan ekonomi, sosial, dan politik. Masyarakat sasaran dapat berperan aktif dalam program ini untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kampung mereka. Pemerintah setempat memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan, pembangunan infrastruktur, dan sosialisasi program, sementara sektor swasta turut berperan dalam membantu pemasaran produk UMKM dan menciptakan lapangan kerja. Melalui kolaborasi ini, paradigma *governance* menekankan peningkatan interaksi antara ketiga aktor tersebut untuk memajukan pembangunan yang berpusat pada kepentingan masyarakat lokal.

1.6.3 Manajemen Publik

Manajemen publik merupakan cabang dari ilmu administrasi publik yang fokus pada perancangan program, restrukturisasi organisasi, alokasi sumber daya melalui sistem anggaran, manajemen keuangan, manajemen sumberdaya manusia, serta evaluasi program dan audit (Shafritz et al., 2017:351). Overman (dalam Keban, 2014:92) mengemukakan bahwa manajemen publik adalah bidang studi lintas disiplin yang mempertimbangkan berbagai aspek umum organisasi, yang melibatkan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian.

1.6.4 Pemberdayaan Masyarakat

1.6.4.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada suatu proses, metode, atau tindakan untuk memberi kekuatan. Menurut Rappaport (dalam Mardikanto & Soebianto, 2017:27) pemberdayaan dianggap sebagai proses mekanisme di mana individu, organisasi, dan komunitas mendapatkan kendali atas nasib atau arah hidup mereka. Anthony Bebbington (dalam Mardikanto & Soebianto, 2017:30) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses di mana mereka yang terpinggirkan dapat berpartisipasi lebih aktif dalam keputusan tentang strategi pertumbuhan pembangunan, dan distribusi produk mereka.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, pemberdayaan masyarakat dapat dipahami sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang saat ini terjebak dalam kemiskinan dan keterbelakangan, dengan memberdayakan mereka. Proses pemberdayaan masyarakat melibatkan beberapa aspek kunci, seperti program yang disusun oleh masyarakat sendiri untuk memenuhi kebutuhan dasar, partisipasi kelompok miskin dan terpinggirkan, pemanfaatan sumber daya lokal, pertimbangan terhadap dampak lingkungan, serta keterlibatan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, sektor swasta, dan lainnya, dengan upaya yang berkelanjutan.

1.6.4.2 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat beberapa tahapan pemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk mengkaji efektivitas pemberdayaan yang sedang berlangsung. Tahapan ini dilakukan dengan menyesuaikan situasi, kapasitas dan respon dari masyarakat sasaran. Tahapan pemberdayaan masyarakat dari Tim Delivery (dalam Mardikanto & Soebianto, 2017:125-127) membagi pemberdayaan masyarakat menjadi empat tahapan, yaitu:

1) Seleksi Lokasi/Wilayah

Wilayah dipilih berdasarkan kriteria yang disetujui oleh lembaga, pihak terkait, dan masyarakat untuk memastikan pemilihan lokasi yang optimal dan mencapai tujuan pemberdayaan yang diinginkan.

2) Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

Sosialisasi adalah cara untuk mengomunikasikan kegiatan dengan masyarakat dan pihak terkait guna membuka dialog. Melalui proses ini, diharapkan pemahaman tentang program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat ditingkatkan. Pentingnya sosialisasi karena dapat mempengaruhi minat dan keterlibatan masyarakat dalam program tersebut.

3) Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup. Pada proses ini masyarakat bersama-sama melakukan langkah-langkah berikut:

- a) Mengenalinya serta menganalisis potensi dan masalah wilayah beserta peluangnya.
- b) Merencanakan kegiatan kelompok.
- c) Melaksanakan rencana kegiatan kelompok.
- d) Terus memantau progres dan hasil kegiatan.

4) Pemandirian Masyarakat

Prinsip pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memberdayakan masyarakat secara mandiri dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Fokusnya adalah membantu masyarakat agar dapat mengatur kegiatannya sendiri. Proses ini melibatkan pendampingan dari tim fasilitator dengan berbagai keahlian. Peran tim pendamping aktif pada

awalnya, namun akan berkurang seiring waktu hingga masyarakat mampu untuk mandiri.

Tahapan pemberdayaan dijelaskan oleh Dwidjowijoto et al., (2007:3-6) menjadi tiga tahapan pemberdayaan:

1. Tahap Penayadaran.

Tahap ini bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang potensi dan hak-hak mereka yang perlu dikembangkan. Upaya penayadaran dimulai dari keinginan internal mereka sendiri untuk menjadi lebih berdaya. Pendekatan yang dilakukan mencakup pendidikan yang mencakup aspek keyakinan, pengetahuan, dan penyembuhan. Prinsip dasar dari tahap ini adalah membuat masyarakat menyadari bahwa pemberdayaan dimulai dari kesadaran dan keinginan mereka sendiri.

2. Tahap pengkapasitasan.

Tahap ini merupakan proses pengembangan keterampilan. Setelah masyarakat menyadari melalui edukasi dan siap menerima pemberdayaan, tahapan selanjutnya adalah membangun keterampilan. Pemberian keterampilan disesuaikan dengan kapasitas individu atau kelompok sehingga mereka mampu mengelola daya atau kekuatan yang diberikan.

3. Tahap Pendayaan.

Tahap pendayaan adalah fase terakhir di mana sasaran diberi kekuatan, wewenang, dan kesempatan sesuai dengan kapasitas mereka,

serta diberi ruang untuk mengekspresikan aspirasi mereka. Mereka juga dibimbing untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah mereka ambil sebelumnya.

1.6.4.3 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip merupakan panduan kebijakan yang konsisten dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Prinsip dapat menjadi dasar utama untuk menjalankan kegiatan dengan benar. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat sasaran. Agen pemberdayaan masyarakat perlu mematuhi prinsip-prinsip yang ada dalam memberdayakan masyarakat. Dirumuskan prinsip-prinsip pemberdayaan oleh Mardikanto & Soebianto (2017:105) sebagai berikut:

- 1) Mengerjakan artinya, partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan sangat penting, di mana mereka terlibat dalam menerapkan berbagai aktivitas program. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk belajar secara langsung, yang akan bermanfaat dalam jangka panjang.
- 2) Akibat artinya, dampak positif atau manfaat yang diperoleh dari kegiatan pemberdayaan sangat penting karena hal ini akan memengaruhi motivasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan belajar atau pemberdayaan di masa yang akan datang, berdasarkan perasaan senang atau puas yang mereka alami.
- 3) Asosiasi menunjukkan bahwa setiap upaya pemberdayaan harus terintegrasi dengan kegiatan lainnya karena individu secara alami

cenderung menghubungkan atau mengaitkan kegiatan yang mereka lakukan dengan kegiatan atau peristiwa lain.

Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan untuk memastikan pembelajaran yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Pemberdayaan juga harus memberikan keuntungan bagi mereka yang terlibat dalam prosesnya dan harus terkait dengan aktivitas lain yang relevan karena merupakan penyebab utama dari terwujudnya pemberdayaan.

1.6.4.4 Keluaran Kampung Tematik Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya dengan menciptakan program kampung tematik. Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 memuat poin-poin terkait *outcome* pelaksanaan kampung tematik berbasis pemberdayaan masyarakat, di antaranya:

- a) Terbentuknya kepribadian dan perilaku masyarakat yang peduli terhadap lingkungan;
- b) Tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui perputaran ekonomi berbasis potensi lokal yang diangkat;
- c) Terciptanya kualitas lingkungan permukiman yang lebih baik dan tertata dengan terwujudnya:
 - 1) Jalan lingkungan yang baik
 - 2) Saluran air yang baik, dan
 - 3) Sanitasi dan penghijauan yang baik.

1.6.4.5 Faktor Penghambat Pemberdayaan

Menurut Arsiyah (2009:374) menyatakan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat menghadapi beberapa hambatan, baik internal maupun eksternal. Hambatan internal dalam pemberdayaan meliputi:

- 1) Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.
- 2) Tidak tersedianya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan.
- 3) Keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan.
- 4) Kurangnya kemampuan dalam mengelola peluang pasar yang tersedia dan terbatasnya modal usaha.

Hambatan eksternal dalam pemberdayaan masyarakat di antaranya yaitu:

- 1) Kurang optimalnya koordinasi pemerintah dengan masyarakat.
- 2) Kurangnya dukungan modal atau kerjasama dari sektor swasta.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka memandirikan masyarakat terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan dengan membagi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kedalam beberapa tahapan, yaitu:

- 1. Pertama, sosialisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.** Usaha untuk menyampaikan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan menarik partisipasi masyarakat untuk menjalankan program yang akan dilaksanakan di suatu wilayah

kampung tematik, yang melihat dari bagaimana pemangku kepentingan dan masyarakat sasaran berupaya untuk saling mendorong partisipasi aktif melalui forum diskusi atau rembuk warga, untuk mengomunikasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan informasi mengenai bantuan pendanaan atau pelatihan dalam pengembangan Kampung *Home* Industri Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang dari pemerintah.

2. **Kedua, proses pemberdayaan masyarakat.** Terdiri dari kegiatan untuk membuat masyarakat lebih mandiri dan berdaya dalam meningkatkan kualitas hidup, seperti :
 - a. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan serta peluang yang ada di Kampung *Home* Industri.
 - b. Menyusun alternatif yang ditentukan berdasarkan prioritas dan aspek-aspek sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta perbaikan kualitas lingkungan dan menerapkan rencana kegiatan kelompok.
 - c. Memantau proses dan hasil kegiatan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat sasaran, terutama aspek infrastruktur atau fisik.
3. **Ketiga, pemandirian masyarakat.** merupakan strategi untuk mempersiapkan agar masyarakat dapat berdaya dan mandiri secara

berkelanjutan yang didampingi fasilitator hingga dapat berjalan sendiri.

Kegiatan yang dapat dilihat dari tahap ini, yaitu :

- a. Bagaimana bentuk kemandirian Kampung *Home* Industri melalui masyarakat sasaran yang memiliki kesadaran dan rasa kepemilikan program agar mampu mengelola kegiatannya sendiri, serta dampak apa saja yang diperoleh dari adanya program pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik.
- b. Menganalisis apakah upaya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat mencapai hasil dan keluaran dari program Kampung *Home* Industri, sesuai dengan yang dimuat dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018, Bab II.

1.7.2 Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat di Kampung *Home* Industri

Faktor Penghambat pada pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Kampung *Home* Industri di antaranya, yaitu :

- 1) Kurangnya partisipasi masyarakat
- 2) Keterbatasan kemampuan manajerial
- 3) Tidak adanya kemampuan mengelola untuk mengembangkan peluang pasar

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian prosedur atau langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam penyelidikan ilmiah untuk memastikan pengumpulan data yang terstruktur dan berjalan melalui tahapan-tahapan yang teratur (Suryana, 2010).

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan induktif yang fokusnya adalah pada pengamatan langsung dari fenomena di lapangan, dimulai dari menganalisis hal-hal yang spesifik kemudian diselidiki pemecahan masalahnya yang dihubungkan dengan teori, dalil atau hukum dan menghasilkan kesimpulan secara umum.

1.8.2 Lokus dan Fokus Penelitian

Lokus penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah Kampung *Home* Industri yang berada pada RW 05 Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kerjasama dengan masyarakat setempat dan pihak terkait lainnya. Lokasi ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik yang menjadi fokus riset. Peneliti menetapkan fokus penelitian untuk membatasi ruang lingkup analisis yang akan dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian dalam bidang administrasi publik, dengan penekanan khusus pada manajemen publik dan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian diambil melalui teknik *snowball sampling*, di mana metode ini dimulai dengan beberapa informan awal yang dipilih secara sengaja, kemudian dimintai untuk merekomendasikan peneliti kepada individu lain yang memiliki karakteristik atau pengalaman yang relevan dengan objek penelitian. Proses ini berlanjut seperti bola salju yang bergulir, di mana setiap informan baru merekomendasikan informan lainnya sehingga informan terus berkembang seiring waktu. Penelitian ini memiliki informan kunci, yaitu Koordinator Kampung *Home* Industri. Informan lainnya, yaitu Sub Koordinator Perencanaan Sosial Bappeda Kota Semarang, Kasi Sosial Kelurahan Karanganyar Gunung, Ketua RW 05 Kelurahan Karanganyar Gunung, Mantan Ketua RW 05 yang menjabat saat pembentukan Kampung *Home* Industri, Kasi Pembangunan Kecamatan Candisari dan masyarakat pelaku UMKM di RW 05.

1.8.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Laporan penelitian akan memuat kutipan langsung untuk menampilkan deskripsi yang lengkap tentang situasi lapangan. Data tersebut terdiri dari transkrip wawancara, dokumentasi foto, dokumen pribadi serta dokumen resmi lainnya, bukan data analisis statistik.

Bila dilihat dari sumber data, menurut Sugiyono, (2017:157) pengumpulan data dapat menggunakan dua sumber data, yaitu :

1. Data primer, merupakan data asli yang diperoleh langsung dari sumbernya, dan sifatnya terkini, yang diperoleh melalui penelitian dan interaksi langsung seperti wawancara kepada Koordinator Kampung *Home* Industri, Sub Koordinator Perencanaan Sosial Bappeda Kota Semarang, Kasi Sosial Kelurahan Karanganyar Gunung, Ketua RW 05 Kelurahan Karanganyar Gunung, Mantan Ketua RW 05 yang menjabat saat pembentukan Kampung *Home* Industri, Kasi Pembangunan Kecamatan Candisari dan masyarakat pelaku UMKM di RW 05.
2. Data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui sumber seperti studi pustaka dari Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal, maupun *e-book* yang relevan dengan topik penelitian.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data mengacu pada langkah-langkah dan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini bertujuan untuk membantu memperoleh data yang autentik bagi peneliti. Menurut Sugiyono (2017:225) teknik pengumpulan data terbagi menjadi empat secara umum, yakni:

1. Observasi

Observasi adalah metode yang diterapkan dengan mengamati langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Fokus observasi dalam penelitian ini adalah bagaimana keadaan lingkungan di Kampung *Home* Industri setelah menjadi kampung tematik.

2. Teknik Wawancara

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2017:231) wawancara adalah interaksi antara dua individu atau lebih yang bertujuan untuk bertukar informasi, pemikiran, dan ide melalui dialog tanya jawab, yang bertujuan untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang topik yang dibahas.

Teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) digunakan untuk memperoleh informasi tentang upaya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program Kampung *Home* Industri di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari serta faktor yang menghambat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan melalui percakapan, baik dengan menggunakan panduan wawancara maupun tidak, di mana informan memiliki pengalaman kegiatan sosial yang relatif lama.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian untuk menganalisis berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen yang digunakan berupa peraturan, *booklet*, foto, bagan dan sumber informasi lainnya. Studi dokumentasi merupakan pendekatan yang melengkapi observasi dan wawancara. Dalam teknik ini, peneliti akan mencatat informasi dari dokumen, merekam audio, serta mengambil foto dari materi yang relevan.

4. Triangulasi

Triangulasi merujuk pada penggabungan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah tersedia (Sugiyono, 2017:241). Tujuan dari triangulasi adalah untuk memastikan keabsahan data dengan memeriksa kredibilitasnya melalui variasi sumber data dan teknik pengumpulan data.

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Melalui pengumpulan data peneliti akan mengolah semua data yang ada. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan menggambarkan data yang diperoleh secara menyeluruh pada proses penelitian. Pengolahan data kualitatif dilakukan dengan melakukan analisis langsung di lokasi penelitian, melalui model Miles dan Haberman (dalam Sugiyono, 2017:244) sebagai berikut :

a) Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi adalah proses meringkas dan menentukan poin-poin kunci yang penting untuk topik dan bentuk penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi informasi yang relevan dan tidak relevan terkait penelitian. Melalui tahap reduksi data, jumlah informasi akan berkurang, menyisakan informasi yang mengarah pada inti permasalahan sehingga mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian dan memudahkan proses pengumpulan data selanjutnya.

b) Penyajian Data

Langkah berikutnya adalah menampilkan data dalam bentuk tabel dan memberikan penjelasan secara deskriptif.

c) Penarikan Kesimpulan

Tahap selanjutnya dalam analisis data, adalah menarik kesimpulan setelah seluruh data menunjukkan inti masalah sebagai objek penelitian yang dapat dipahami sehingga kesimpulan dapat dibuat sebagai hasil dari penelitian.

1.8.7 Kualitas Data atau Validitas Data

Pada penelitian kualitatif penting untuk memastikan keabsahan data melalui pengujian. Peneliti menggunakan berbagai teknik dalam menentukan keabsahan data atau validitas data, dengan membandingkan data pada sumber lain atau menggunakan cara lain dan berbagai waktu. Pada penelitian ini, uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, diantaranya :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan metode untuk menguji data dengan membandingkan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah metode untuk menguji data dengan cara mengecek atau membandingkan data kepada sumber yang sama, namun menggunakan teknik yang berbeda, seperti membandingkan wawancara dan di cek dengan observasi, atau dokumentasi.